

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha pembudidayaan ikan di Indonesia sudah tumbuh menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga investasi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan menjelaskan bahwa usaha ini merupakan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkannya.¹ Sektor perikanan budidaya mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Produksi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan pasar ekspor.²

Potensi lahan perikanan budidaya seluas 17,91 juta hektar yang terbagi atas perikanan budidaya air tawar seluas 2,83 juta hektar, perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan perikanan budidaya laut seluas 12,12 juta hektar. Namun demikian, potensi perikanan budidaya yang ada di Indonesia selama ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, tingkat pemanfaatan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan.

² Abdina, Muhammad Fadly. 2024. Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Di Perairan Danau Toba. *Jurnal Pertanian Agros*. Vol. 26, No. 1. Diakses pada 28 Agustus 2024.

masih rendah, potensi lahan yang termanfaatkan baru mencapai 6%.³ Tingkat pemanfaatan yang rendah terutama untuk budidaya laut yang mana pemanfaatannya hingga saat ini baru 1,39 persen sedangkan untuk budidaya air tawar yang baru termanfaatkan 10,26 persen dan 22,48 persen pada budidaya air payau.

Selain itu, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan budidaya secara berkelanjutan, yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Tata Cara, Persyaratan dan Penempatan Kawasan Budidaya Perikanan., terutama pada budidaya air laut dan air payau karena menggunakan lahan laut dan pesisir. Permasalahan tersebut, seperti pembuangan air limbah atau sisa ternak yang mencemari lingkungan sekitar usaha budidaya. Sampai saat ini, belum ada standar yang jelas tentang pengelolaan limbah perikanan budidaya. Konflik mengenai kepentingan pemanfaatan tata ruang lahan dan air yang disebabkan kawasan perikanan budidaya seringkali tidak dilindungi pemanfaatannya dengan peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, permasalahan mengenai produktivitas perikanan budidaya yang menurun karena penyakit dan hama pada komoditas budidaya serta penurunan kualitas bibit atau benih ikan dan pakan yang digunakan. Implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) juga belum optimal dilaksanakan oleh para pembudidaya ikan. Sehingga, untuk

³ KKP. 2024. “Menteri Trenggono Ajak Sarjana Perikanan Kembangkan Budidaya Lima Komoditas Unggulan Ekspor”, <https://kkp.go.id/news/news-detail/menteri-trenggono-ajak-sarjana-perikanan-kembangkan-budidaya-lima-komoditas-unggulan-ekspor->. Diakses pada 28 Agustus 2024. Pukul 08.20 WIB.

mengoptimalkan dan memperkuat pengembangan usaha budidaya ini, sektor perikanan budidaya menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2020-2024.⁴

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki rata-rata jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) pembudidaya ikan terbanyak di Pulau Sumatera.⁵ Potensi yang cukup besar pada bidang kelautan dan perikanan dengan panjang pantai yang membentang dari Kabupaten Pasaman Barat hingga Kabupaten Pesisir Selatan dan termasuk juga di Kepulauan Mentawai, menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan budidaya air payau, air tawar, air laut dan lainnya. Hal ini juga didukung sebab empat danau yang menyebar di kabupaten atau kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah serta ditambah dengan waduk, kolam, embung dan sungai. Selain itu, telah terbentangnya potensi budidaya payau dan budidaya laut dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan.⁶ Berikut tabel jumlah Rumah Tangga (RTP) pembudidaya ikan di menurut Provinsi di Pulau Sumatera :

Tabel 1.1
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pembudidaya Ikan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021-2023

No	Provinsi Pulau Sumatera	Pembudidaya Ikan		
		2021	2022	2023

⁴ Christiana Dominika, dkk. 2024. "Menuju Hilirisasi Sektor Perikanan Indonesia yang Kuat dan Berkelanjutan", <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/menuju-hilirisasi-sektor-perikanan-indonesia-yang-kuat-dan-berkelanjutan>. Diakses pada 28 Agustus 2024. Pukul 14.28 WIB.

⁵ Website Satu Data KKP : <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/prod-ikan/tbl-statis/d/75>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2024. Pukul 08.24 WIB.

⁶ RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1.	Aceh	32.642	38.155	38.860
2.	Bengkulu	6.904	7.568	7.196
3.	Jambi	14.943	15.453	15.405
4.	Kepulauan Bangka Belitung	2.236	2.372	2.598
5.	Kepulauan Riau	5.057	5.574	6.071
6.	Lampung	50.902	52.199	49.770
7.	Riau	24.708	25.294	25.216
8.	Sumatera Barat	72.823	67.150	62.259
9.	Sumatera Selatan	62.484	45.033	65.139
10.	Sumatera Utara	31.899	37.107	39.986
Pulau Sumatera		304.598	295.905	312.500

Sumber : Satu Data KKP, <https://portaldata.kkp.go.id/>

Dari tabel 1.1 tersebut dapat terlihat bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah RTP pembudidaya ikan terbanyak, akan tetapi hanya Provinsi Sumatera Barat yang tiap tahunnya mengalami penurunan jumlah RTP pembudidaya ikan dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Selain itu, tingkat pemanfaatan lahan budidaya di Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya dilakukan, seperti yang dikatakan oleh Gubernur Sumatera Barat bahwa dari 425.047 Ha luas lahan budidaya, hanya seluas 11.992 Ha lahan yang baru dimanfaatkan. Beliau juga mengungkapkan bahwa 99% lahan diantaranya adalah untuk budidaya air tawar, sehingga masih sedikit peluang yang dimanfaatkan untuk budidaya laut dan budidaya payau (tambak).⁷ Berikut potensi dan eksisting luas lahan perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat :

⁷ Minangkabaunews.com. 2022. Sumbar Miliki Potensi Besar Bidang Kelautan dan Perikanan. <https://minangkabaunews.com/sumbar-miliki-potensi-besar-bidang-kelautan-dan-perikanan/>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2024. Pukul 12.05 WIB.

Tabel 1.2
Potensi Dan Eksisting Luas Lahan Perikanan Budidaya Di Provinsi Sumatera Barat

Perikanan Budidaya	Air Payau		Air Tawar		Air Laut	
	Potensi	Eksisting	Potensi	Eksisting	Potensi	Eksisting
Tahun						
2021	5.281	161,35	30.726,60	11.356,05	17.703	14,42
2022	5.310	257,56	29.451,68	11.409,64	17.703	14,46
2023	5.326,20	540,84	30.899,31	15.040,12	17.703	14,54

Sumber : Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat pemanfaatan lahan budidaya masih jauh dari angka potensi yang tersedia, terutama pada budidaya air payau dan air laut. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk pengembangan perikanan budidaya air payau dan laut masih sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, Pengelolaan perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat tersebut masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang berdampak pada kesejahteraan pembudidaya, seperti biaya benih dan pakan yang tinggi, sarana dan prasarana yang belum memadai, terjadinya penurunan mutu lingkungan, masih rendahnya SDM dan lemahnya penggunaan teknologi pembudidaya serta keterbatasan akses sumber daya. Selain itu, kendala dari faktor alam berupa perubahan cuaca, iklim dan serangan hama serta penyakit ikan.⁸

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terdapat peluang dan ancaman dalam sektor perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut sesuai

⁸ *Ibid.* Hlm. 110-111.

dengan yang dijelaskan oleh Firman Hamidi R, S. Pi selaku analis akuakultur ahli muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat :

“...Peluang potensi budidaya ini sangatlah luas dan semakin berkembang di Sumatera Barat dengan beragam komoditasnya. Tapi untuk sekarang ini yang menjadi ancaman di sektor budidaya ini terkait persoalan harga pakan yang terlalu mahal, dengan harga pakan yang mahal tentu tidak seimbang dengan hasil produksinya karena biaya produksinya lebih tinggi. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh ke kita...” (Wawancara dengan analis akuakultur ahli muda Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada 18 Oktober 2024)

Harga pakan yang cenderung terus meningkat membuat pembudidaya ikan kesulitan dalam biaya. Kelompok pembudidaya ikan sering mengeluhkan masalah ini, salah satunya kelompok budidaya di Kabupaten Pasaman yang mengalami margin pakan dan harga ikan perkilogram itu sangat relatif tipis sehingga menyebabkan keuntungan pembudidaya ikan semakin kecil.⁹ Banyak juga pembudidaya yang terpaksa membeli dan menggunakan pakan ikan dengan kualitas protein lebih rendah dari pakan ikan biasanya.¹⁰

Kemudian permasalahan yang sangat krusial lain terkait benih ikan. Banyak benih yang mengalami kematian karena kondisi kualitas air yang buruk disebabkan oleh pencemaran sisa pakan, perubahan suhu dan kadar oksigen. Bantuan benih ikan yang masih didatangkan dari luar daerah juga banyak yang mengalami kematian saat pendistribusian ke daerah tujuan. Hal ini dikarenakan jarak tempuh yang jauh antara daerah asal pengantaran benih dengan daerah tujuan penerima

⁹ Kumparan.com. 2022. “Petani Ikan di Pasaman Keluhkan Margin Pakan dan Harga Ikan Relatif Tipis”. <https://kumparan.com/langkanid/petani-ikan-di-pasaman-keluhkan-margin-pakan-dan-harga-ikan-relatif-tipis-1z4foUI79bx>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2024. Pukul 14.49 WIB.

¹⁰ TVRISumbar. “Harga Pakan Ikan Niak, Pemilik Kolam Mengeluh”. <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/3116/harga-pakan-ikan-naik,-pemilik-kolam-mengeluh.html>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023. Pukul 11.50 WIB.

bantuan. Proses pengangkutan yang memakan waktu lama dan kurangnya fasilitas pendukung serta metode pengemasan yang tidak sesuai menyebabkan benih mengalami penurunan kualitas.¹¹

Permasalahan lainnya dalam perikanan budidaya ini yaitu terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan. Terjadinya peristiwa *upwelling* atau umbalan menyebabkan naiknya massa air yang mendorong zat organik dan sisa pakan naik ke atas permukaan air, sehingga berdampak terjadinya kematian massal ikan. Selain itu, faktor pendorong terjadinya peristiwa ini akibat jumlah KJA yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan di laut ataupun di danau sehingga pemicu terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas pada air.¹²

Faktor lain yang mempengaruhi produksi perikanan budidaya yaitu perubahan iklim dan cuaca. Ikan budidaya biasanya banyak terserang penyakit seperti kena virus, bakteri dan bisa juga jamur pada saat terjadinya perubahan iklim. Seperti laporan kematian ikan pembudidaya di Kota Pariaman karena perubahan cuaca ekstrem, sehingga menurunnya imun tubuh ikan dan mudahnya terserang penyakit. Selain menjaga suhu air ikan budidaya di saat perubahan iklim, diperlukan juga suplai vitamin agar daya tahan tubuhnya terjaga.¹³

¹¹ Lakip DKP. Ibid. Hal. 110.

¹² Lakip DKP. Op.Cit. Hlm. 110.

¹³ Haluan.com. 2022. Pelaku Budidaya Perikanan Air Tawar di Kota Pariaman Keluhkan Serangan Hama. <https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10258237/pelaku-budidaya-perikanan-air-tawar-di-kota-pariaman-keluhkan-serangan-hama>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2024. Pukul 14.31 WIB.

Dari beberapa permasalahan dan kendala tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan pada perikanan budidaya ini yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat ini dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh kepala dinas serta bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Hal ini didasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Pegelolaan perikanan budidaya ini merupakan tugas dari bidang perikanan budidaya yang terdiri dari tiga seksi yaitu seksi produksi dan usaha budidaya, seksi perbenihan dan pakan, serta seksi kesehatan ikan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau penunjangnya serta untuk penyediaan benih dan pakan ikan dibantu oleh UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP).¹⁴

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang menetapkan tujuannya yaitu “Meningkatnya Pendapatan” dengan indikator tujuannya adalah pendapatan pembudidaya ikan dan pendapatan nelayan. Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya misi ke 3 (tiga) yakni “Meningkatkan

¹⁴ Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Nilai Tambah dan Produktivitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan”.

Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam pengelolaan perikanan budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan strategi dan arah kebijakan perikanan budidaya sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan	
Misi 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor perikanan	Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat
Mengembangkan usaha-usaha Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan	Pengembangan budidaya perikanan payau (udang vaname) dan komoditas perikanan lainnya

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Dari tabel 1.3 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pembudidaya ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan strategi dan arah kebijakan yaitu meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan penyediaan benih bersertifikat dan mengembangkan usaha perikanan budidaya payau (udang

vaname) serta komoditas budidaya lainnya. Untuk melaksanakan strategi pengelolaan perikanan budidaya tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat melakukan kegiatan-kegiatan utama berupa penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan beberapa sub kegiatannya, seperti penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan, pembinaan dan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.¹⁵

Perikanan budidaya mempunyai 3 (tiga) jenis usaha berdasarkan media air yang digunakan, yaitu budidaya air laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar. Pada penelitian ini, peneliti akan menfokuskan manajemen strategi pada pengelolaan perikanan budidaya air laut dan air payau. Hal ini dikarenakan budidaya air tawar secara umum menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang membagi tingkat kewenangan. Sementara itu, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk menangani kegiatan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota atau yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien jika dilakukan oleh provinsi, yang mana hal ini untuk budidaya air laut dan air payau. Dikarenakan budidaya air laut dan payau memerlukan infrastruktur dan teknologi yang lebih besar serta melibatkan kawasan pesisir atau perairan lepas yang dapat melintasi batas administrasi kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan yang

¹⁵ Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

disampaikan oleh Resi Suriati, S.Pi., M.Si selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

“...Kalau untuk budidaya air tawar itu sudah pindah kewenangan. Air tawar itu kewenangnya ada di kabupaten/kota, jadi kita hanya bisa melakukan pembinaan kepada kelompok budidaya air tawar, tetapi kalau untuk pengelolaannya kita provinsi tidak bisa, karena bukan kewenangan kita sesuai dengan aturan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Sehingga kalau untuk pengelolaan kita khusus ke budidaya air laut dan payau...” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada 23 Mei 2025)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat hanya melakukan pengelolaan untuk budidaya air laut dan payau. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) yang memang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang budidaya air laut dan payau. Sehingga hal ini menjadikan pengelolaan budidaya air laut dan air payau yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terdapat kelemahan-kelemahan pada manajemen strategis yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya air lau dan payau. Pertama, masih belum terlaksana dengan baik kegiatan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dan pemanfaatan lahan usaha perikanan budidaya yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Berdasarkan tabel 1.3 di atas terlihat bahwa arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mengembangkan budidaya payau terutama untuk komoditas udang vaname. Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah

terluas dalam pengembangan budidaya udang vaname di Provinsi Sumatera Barat karena berada di kawasan pesisir yang mana sangat berpotensi untuk budidaya udang vaname. Namun, terdapat beberapa permasalahan pada kegiatan budidaya udang vaname yang ada di Sumatera Barat, diantaranya belum ada izin usaha. Banyak pembudidaya yang tidak melakukan pengurusan izin usaha terlebih dahulu. Terdapat 70 unit usaha budidaya udang di Kabupaten Padang Pariaman, tetapi hanya sekitar 20 unit usaha yang sesuai dengan tata ruang. Sesuai dengan yang dijelaskan Siti Aisyah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat bahwa:¹⁶

“...Seluruh budidaya tambak udang yang ada di Sumatera Barat dapat dikatakan illegal alias tidak berizin. Hal ini disebabkan kebanyakan kawasan usaha budidaya tambak udang di Sumbar tidak berada di lahan yang ada sesuai dengan tata ruang...” (Hasil wawancara Tribunsumbar.com dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada 08 Desember 2022)

Sehingga pengembangan budidaya udang vaname ini tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Karena belum sesuai dengan tata ruang ini, jika dibiarkan akan berdampak terhadap lingkungan kedepannya di kawasan sempadan pantai dan terutama masyarakat sekitar Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan realita atau kondisi di lapangan.

Kedua, untuk meningkatkan penyediaan dan pemakaian pakan atau benih ikan yang unggul agar menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya,

¹⁶ Trnsumbar.com. 2022. Tambak Udang Menjamur, Nasib Stabilitas Ekologis Terancam. <https://www.trnsumbar.com/tambak-udang-menjamur-nasib-stabilitas-ekologis-terancam>. Diakses pada 18 Desember 2024. Pukul 20.48 WIB.

dilakukan pembinaan dan pemantauan proses cara budidaya ikan yang baik (CBIB). Namun, penerapannya masih belum berjalan secara optimal dikarenakan kurang meratanya sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Sebagaimana yang dipaparkan oleh Firman Hamidi R, S. Pi selaku analis akuakultur ahli muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat:

“...Dari DKP sendiri dilakukan beberapa pelatihan. Ada pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB). Untuk pelatihannya kita mengundang kelompok pembudidaya ikan dan mereka datang ke DKP. Kita kasih materi pelatihannya dan praktek lapangannya. Tetapi memang tidak semua peserta atau kelompok itu yang hadir, terkadang ada juga yang diwakilkan kehadirannya sehingga bukan ketua pelaku usahanya langsung...” (Wawancara dengan analis akuakultur ahli muda Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada 18 Oktober 2024)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak pembudidaya ikan yang tidak mengikuti pelatihan sehingga kurangnya pengembangan SDM dan pemahaman terkait pentingnya CBIB. Hal ini menyebabkan pembudidaya banyak yang mengalami gagal panen karena keterbatasan keterampilan atau penguasaan teknologi dan juga menyebabkan produk yang dihasilkan tidak terjamin mutunya, karena pembudidaya tidak menerapkan dan mengikuti prosedur CBIB.¹⁷ Berdasarkan Dokumen Rekap Sertifikat CBIB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, jumlah kelompok pembudidaya ikan yang memiliki sertifikat CBIB baru sebanyak 94 kelompok dari 2164 kelompok yang ada. Hal ini menunjukkan masih banyak kelompok

¹⁷ Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat 2021.

pembudidaya ikan yang belum mempunyai sertifikat CBIB di Provinsi Sumatera Barat.

Ketiga, pada bidang perikanan budidaya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini sesuai dengan tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Analisis Kebutuhan Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2023

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal

Sumber : Lakip Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut terlihat bahwa untuk bidang perikanan budidaya masih kekurangan SDM yang mendukung kinerja sehingga diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kemampuan kompeten baik dari sisi manajerial usaha maupun teknik produksi dalam pencapaian sasaran strategis pengelolaan perikanan budidaya. Selain itu, belum setiap pegawai peduli dan memahami serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, terlihat dari masih terdapat pegawai dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang belum menyusun dan mengukur realisasi rencana

aksi secara berkala.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kekurangan atau kelemahan pada sumber daya manusia dan perencanaan kerjanya.

Keempat, belum tersedianya fasilitas pendistribusian bantuan benih ikan dan kurangnya penguasaan teknologi dalam pengelolaan perikanan budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendukung kinerja pengelolaan perikanan budidaya ini diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang harus memadai, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa banyak bantuan benih ikan yang mati saat mobilisasi ke daerah tujuan, sehingga dibutuhkan fasilitas pendukung untuk pengangkutan atau pengemasan bantuan benih ikan tersebut.¹⁹

Dalam mengatasi masalah benih dan biaya pakan yang tinggi, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat mendorong kelompok pembudidaya ikan untuk membuat benih dan pakan ikan sendiri supaya menurunkan biaya produksi serta meningkatkan perekonomian kelompok pembudidaya ikan. Namun, hal ini belum optimal dilakukan karena keterbatasan SDM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Firman Hamidi R, S. Pi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat :

“...Dari kita sendiri menganjurkan mencari pakan-pakan alami, kita juga menggunakan maggot sebagai bahan baku alternatif untuk pakan ikan lain, kita juga telah melakukan Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri), tetapi kegiatan ini belum optimal dilakukan karena teknologi dan keterampilan pembudidaya yang kurang memadai...”
(Wawancara dengan analis akuakultur ahli muda Bidang Perikanan

¹⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

¹⁹ LAKIP DKP. Op.Cit. Hal. 110.

Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada 18 Oktober 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program gerakan pakan mandiri dan pemanfaatan bahan baku alternatif seperti manggot atau pakan alami tersebut belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan rendahnya keterampilan teknis pembudidaya ikan dalam memproduksi dan mengelola pakan secara mandiri.

Kelima, pada indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat pada tahun 2023 tidak mencapai target. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,07	5,83	544,86
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,39	2,052	60,53
3.	Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	156,85	291	185,53

4.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,26	7,5	103,30
5.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	52,94	59,75	112,86
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,15)	A (80,22)	100,09
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	A (82,50)	A (86,65)	105,03
Rata-Rata Capaian Kinerja					173,17

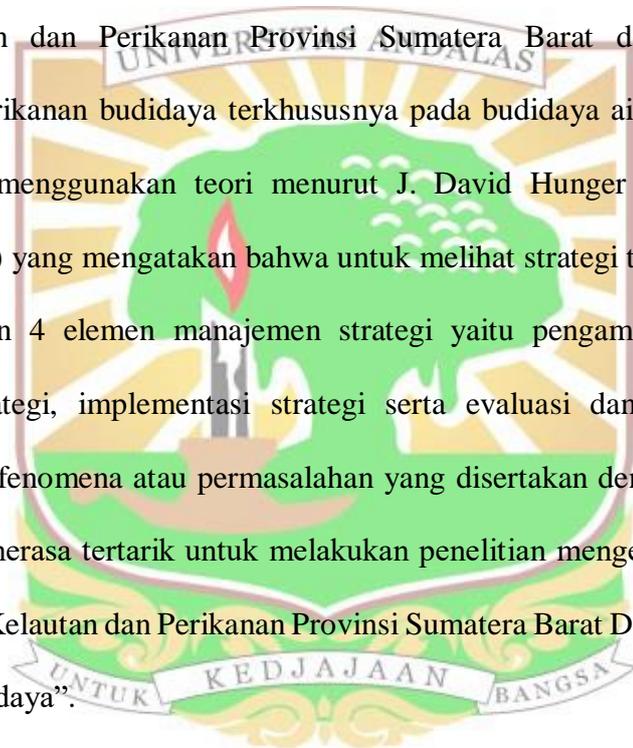
Sumber : LAKIP DKP 2023

Dari tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan 7 indikator kinerja, hanya terdapat 1 indikator yang tidak tercapai yaitu persentase peningkatan produksi perikanan budidaya yang mana target pada Tahun 2023 sebesar 3,39%, tetapi yang terealisasi hanya sebesar 2,052% dan termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan pada Tahun 2022 semua indikatornya tercapai di atas 100% yang mana termasuk dalam kategori memuaskan.²⁰

²⁰ LAKIP DKP. Op.Cit. Hlm. 61-62.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan perikanan budidaya, perlu adanya sebuah manajemen strategi yang baik. Sehingga perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat diharapkan terus berkembang dan meningkat, bukan hanya dari segi kuantitas, akan tetapi juga dari segi kualitasnya.

Untuk melihat dan mempelajari lebih lanjut mengenai manajemen strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan perikanan budidaya terkhususnya pada budidaya air laut dan payau, maka peneliti menggunakan teori menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003) yang mengatakan bahwa untuk melihat strategi terlaksana dengan baik dibutuhkan 4 elemen manajemen strategi yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi serta evaluasi dan pengendalian.²¹ Berangkat dari fenomena atau permasalahan yang disertakan dengan data di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Manajemen Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan Perikanan Budidaya”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang di atas, yang mana masih banyaknya permasalahan yang dihadapi pembudidaya ikan dan kendala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan perikanan budidaya, maka rumusan masalah yang peneliti rancang

²¹ Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. Manajemen Strategis. Yogyakarta: Penerbit Andi.

adalah “Bagaimanakah Manajemen Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan Perikanan Budidaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan perikanan budidaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan pengetahuan administrasi publik, serta bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan manajemen strategi pengelolaan perikanan budidaya. Keberhasilan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan kepada mahasiswa administrasi publik yang lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dapat mengaplikasikan keilmuan yang didapat selama berkuliah di departemen administrasi publik. Selain itu, menambah ilmu dan wawasan terutama hal-hal mengenai manajemen strategi pengelolaan perikanan budidaya.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk lebih memperhatikan pengelolaan perikanan budidaya.

3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen strategi pengelolaan perikanan budidaya, serta dapat menjadikan perbandingan untuk peneliti yang lainnya.

